

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 26
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 24 Februari 2010
W a k t u	: Pukul 09.30 s/d 12.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Ir. Nurdin Tampubolon didampingi Ketua dan Wakil Komisi VI DPR RI (Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA dan Aria Bima)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Kepala BAPPEBTI beserta jajaran B. orang dari 52 orang Anggota.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dibuka pada pukul 09.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

II. KESIMPULAN

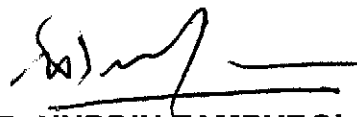
1. Komisi VI DPR RI meminta BAPPEBTI untuk meningkatkan pengembangan, pengawasan dan utilisasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistik Resi Gudang dan Pasar Lelang melalui langkah-langkah dalam perencanaan dengan *timeframe* yang jelas untuk melakukan:
 - a. Peningkatan sosialisasi, edukasi dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait yang dilakukan secara berkesinambungan,
 - b. Penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengikuti kebutuhan pasar dan perdagangan internasional,
 - c. Pengembangan SDM BAPPEBTI, infrastruktur dan kelembagaan pendukungnya, khususnya daerah-daerah penghasil komoditi.
2. Untuk mengoptimalkan Sistik Resi Gudang (SRG), Komisi VI DPR RI meminta BAPPEBTI untuk menyiapkan strategi, program, anggaran dan *timeframe* yang jelas untuk:
 - a. Memperluas implementasi dan infrastruktur pendukung SRG di lebih banyak daerah dengan lebih banyak komoditi;
 - b. Meningkatkan partisipasi petani/kelompok tani, koperasi dan UKM dalam penggunaan SRG;
 - c. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian terkait, sektor swasta maupun pihak perbankan;
 - d. Mempercepat penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan SRG maupun peraturan-peraturan pendukung (misalnya mengenai *Indemnity Fund*).
3. Komisi VI DPR RI mendukung rencana Pemerintah untuk mengamandemen UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Amandemen UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Selanjutnya Komisi VI meminta kepada Pemerintah menyampaikan draft dan naskah akademik kepada DPR RI.
4. Dalam upaya mencegah terjadinya praktek-praktek perdagangan ilegal yang dilakukan oleh Pialang dan Pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Komisi VI DPR RI meminta BAPPEBTI untuk melakukan penyempurnaan mekanisme perijinan, pengawasan dan secara proaktif melakukan investigasi terhadap pelaku perdagangan ilegal, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 12.45 WIB.

Jakarta, 24 Februari 2010

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



IR. NURDIN TAMPUBOLON
No. A-01